

ABSTRAK

Nama : Yumani
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Terhadap Akta Pembagian Hak Bersama (Aphb) Yang Batal Demi Hukum

Surat Keterangan Waris (SKW) merupakan dokumen yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi seseorang sebagai ahli waris, namun banyak yang dipalsukan. Dalam tesis ini, akan dikaji mengenai pertanggungjawaban hukum dari Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan Surat Keterangan Waris (SKW) palsu melalui studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 688K/Pid/2017. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah melakukan kelalaian atau kesengajaan dalam membuat akta sehingga mengakibatkan akta tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang kuat di kemudian hari dan bahkan dapat mengubah akta tersebut menjadi akta di bawah tangan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 688K/Pid/2017, tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh Kepala Desa, Lurah, dan Camat untuk mendaftarkan Surat Keterangan Waris (SKW) palsu pada akta yang cacat hukum karena tidak terpenuhi syarat subjektif (kesepakatan kedua belah pihak) yang berakibat batal demi hukum. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, seorang Notaris harus memegang dan menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengatur mengenai kewenangan, tugas, dan larangan dalam membuat akta.

Kata Kunci: Pertanggung jawaban Hukum, Surat Keterangan Waris (SKW) Palsu.

ABSTRACT

Name : Yumani
Study Program : Magister Kenotariatan
Title : *Legal Liability for Notaries as Land Deed Officials (PPAT) Against Canceled Deed of Division of Joint Rights (APHB) By Law*

The Certificate of Inheritance (SKW) is a document intended to identify a person as an heir, but many are falsified. In this thesis, the legal responsibility of the Deed of Joint Rights Distribution (APHB) made by a The Land Deed Making Officer (PPAT) based on a fake Certificate of Inheritance (SKW) will be studied through a case study of the Supreme Court Decision Number 688K/Pid/2017. The research method used in writing this thesis is normative legal research. The Land Deed Making Officer (PPAT) in the results of this study showed that there had been negligence or deliberate action in making the deed so that the deed could not be used as strong evidence in the future and could even change the deed into a private deed. Based on the Supreme Court Decision Number 688K/Pid/2017, deliberate actions carried out by the Village Head, Sub-district Head and District Head to register a fake Certificate of Inheritance (SKW) on a deed that is legally flawed because the subjective requirements (agreement of both parties) are not met, which results in it being null and void by law. As stated in Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary, a Notary must hold and carry out his duties in accordance with applicable laws and regulations, which regulate the authority, duties and prohibitions in making deeds.

Keywords: Legal Liability, Fake Certificate of Inheritance (SKW).